



**PENEMUAN HUKUM
DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010)**

TESIS

NANA SUPENA

2010622002

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

2022



**PENEMUAN HUKUM
DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010)**

**TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**NANA SUPENA
2010622002**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nana Supena
NRP : 2010622002
Tanggal : 10 Juli 2022

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Nana Supena

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nana Supena
NRP : 2010622002
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEMUAN HUKUM DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL
BERSYARAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI,
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:
46/PUU- VIII/2010.**

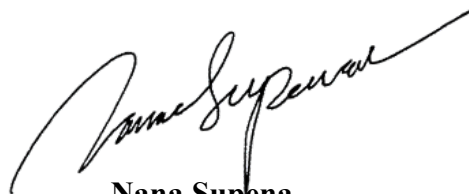
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2022

Yang menyatakan,



**Nana Supena
NRP. 2010622002**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

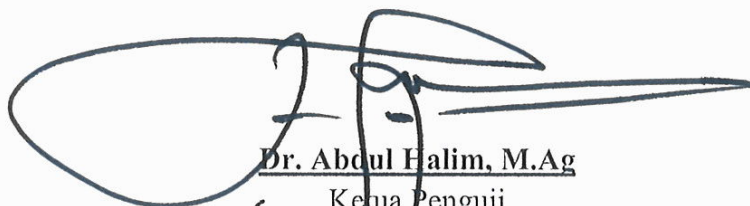
Nama : Nana Supena

NRP : 2010622002

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **PENEMUAN HUKUM DALAM TAFSIRAN
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, ANALISIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:
46/PUU- VIII/2010**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Ketua Penguji



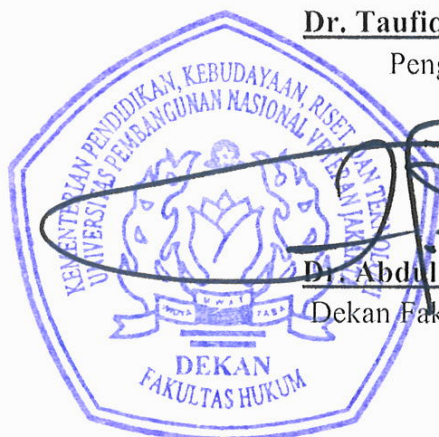
Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Penguji I/Pembimbing



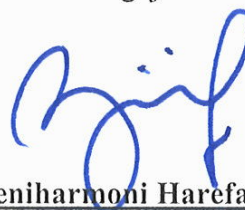
Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.

Penguji II



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM

Kaprodi Hukum Magister Hukum

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 13 Juli 2022

PENEMUAN HUKUM
DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010)

NANA SUPENA

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penemuan hukum tafsiran inkonstitusional bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang terfokuskan pada Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010. Kajian ini dilatarbelakangi oleh luasnya kewenangan MK dalam penafsiran konstitusi, termasuk berbagai putusan yang dinilai kontroversial. Hasil kajian menunjukkan bahwa UUD 1945 secara tersirat memberikan kewenangan penafsiran konstitusi kepada MK untuk menilai pertentangan norma hukum dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang. Beberapa hal yang menarik dalam melaksanakan penafsiran konstitusi sebagai tolok ukur untuk menilai pertentangan norma hukum, meliputi: *Pertama*, terkait dengan independensi dan kebebasan hakim dalam menggunakan metode penafsiran yang tidak diatur dalam hukum positif, maka hakim bebas menggunakan metode penafsiran tersebut yang sesuai dengan keyakinan hakim. *Kedua*, munculnya inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan undang-undang, padahal nyatanya tafsiran hakim MK adalah hanya sebagai metode penemuan hukum/*rechtsvinding* terhadap aturan yang ada, tetapi tidak mudah untuk diterapkan pada hukum acara. *Ketiga*, adanya temuan inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. *Keempat*, konsekuensi yuridis *pasca* temuan inkonstitusional bersyarat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seorang anak yang lahir di luar kawin, namun demikian, sangat sulit dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologis dan/atau untuk memperoleh bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain terkait adanya hubungan darah dengan ayah biologis.

Kata Kunci : Penemuan Hukum, Interpretasi Hukum, Inkonstitusional Bersyarat.

**RECHTSVINDING
IN CONDITIONAL INCONSTITUTIONAL INTERPRETATION
ON THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
(Analysis of Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010)**

NANA SUPENA

Abstract

This study was conducted to examine the finding of conditional unconstitutional interpretation law in the decision of the Constitutional Court, which focused on the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010. This study is motivated by the broad authority of the Constitutional Court in interpreting the constitution, including various decisions that are considered controversial. The results of the study show that the 1945 Constitution implicitly gives the Constitutional Court the authority to interpret the constitution to assess the conflicting legal norms in examining the constitutionality of the law. Some of the interesting things in implementing the interpretation of the constitution as a benchmark for assessing conflicting legal norms, include: First, related to the independence and freedom of judges in using interpretive methods that are not regulated in positive law, judges are free to use the interpretation method that is in accordance with the judge's belief. Second, the emergence of conditional unconstitutionality in the Constitutional Court's decision is considered a form of abuse of power in interpreting the law, even though in fact the interpretation of the Constitutional Court judge is only a method of legal discovery/rechtsvinding against existing rules, but it is not easy to apply to procedural law. Third, the finding of conditional unconstitutionality in the Constitutional Court's decision Number: 46/PUU-VIII/2010 provides a new interpretation of Article 43 paragraph (1) of Law Number: 1 of 1974 concerning Marriage which is conditionally unconstitutional, namely unconstitutional as long as the verse is interpreted as eliminating civil relations with men who can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law having blood relations as the father. Fourth, the juridical consequences after finding unconstitutional conditions provide legal guarantees and certainty for a child born out of wedlock, however, it is very difficult to obtain recognition from the biological father and/or to obtain evidence based on science and technology and/or other evidence. related to blood relations with biological fathers.

Keywords : Rechtsvinding, Legal Interpretation, Conditional Unconstitutional.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: **PENEMUAN HUKUM DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010)** guna memperoleh Magister Hukum (S.2) di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Erna Hernawati, AK., CPMA., CA., CGOP Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. Abdul Halim, M.Ag. Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan izin, kemudahan dan memfasilitasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Magister di UPNVJ tepat waktu;
3. Dr. Beni Harmoni Harefa, LL.M., Kaprodi Magister Ilmu Hukum UPNVJ yang selalu memberikan perhatian, semangat dan memotivasi kepada penulis agar dapat segera menyelesaikan studi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan tepat waktu;
4. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., Assoc. Professor Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Dosen Pembimbing penulis yang telah rela tanpa pamrih meluangkan waktu serta pemikirannya dengan sabar dan bersemangat dalam memberikan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam perbaikan dan penyusunan Tesis ini, hingga Penulis dapat menyelesaikannya. Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan

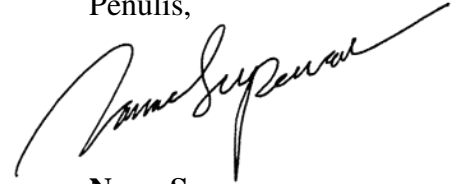
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang amat luas dan *terupdate* terhadap fenomena seputar dunia hukum yang terjadi, kebijaksanaan, ketelitian dalam memberikan pendapat dan menyusun pernyataan serta motivasi yang luar biasa;

5. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Assoc. Professor Hukum, Dosen penulis yang sabar dan semangat dalam memberikan pendidikan dan pengajaran hingga penulis mendapatkan pencerahan ilmu dengan melihat dari berbagai perspektif;
6. Dosen, Karyawan, dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum UPNVJ yang selama dua tahun membantu penulis dalam prosesi kuliah maupun administrasi;
7. Keluarga penulis Ayahanda Yoyo Sunaryo, Ibunda Titi Darmiyati, Adinda Ani Cahyani, dan kakanda Enok Reni, Rohidin Albirri, Mia Rusmiati, Sherly Siti Rohayati, Rudi Abrar yang selalu menjadi penyemangat dan tempat sandaran, serta tempat mencurahkan segala keluh kesah penulis dikala suka maupun duka;
8. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UPNVJ 2020 terkhusus kelas A dan konsentrasi Kenegaraan atas kekompakan, kebersamaan yang amat baik. Semoga rekan-rekan yang masih menyusun Tesis, dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikannya;
9. Majelis Syura Persatuan Ummat Islam (PUI) Periode 1440-1445 H / 2019-2024 M yaitu : Bapak Dr. KH. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., selaku Ketua, Bapak H. Nazar Haris, M.BA sebagai Wakil Ketua, dan Drs. H.M. Iding Bahrudin, M.M.Pd. selaku Sekretaris atas motivasi dan pencerahannya dalam *Tholabulilmi*;
10. Kerabat, sahabat dan teman yang selalu setia menemani di saat suka maupun duka Mia Farida, Yusri Wahyuni, staff Kantor Hukum Garda Law Office, staff kantor Hukum BRILIAN Law Firm dan teman-teman Organisasi Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI).

Akhir kata, semoga Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. dan Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum kenegaraan secara teori maupun praktik serta bermanfaat bagi para pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Jakarta, 10 Juli 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nana Supena', written in a cursive style.

Nana Supena

NRP. 2010622002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual	8
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Teori Interpretasi Hukum	30
B. Teori Penemuan Hukum	32
C. Asas-asas Penemuan Hukum pada Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat	34
D. Teori Pengujian undang-undangan (<i>judicial review</i>).....	35
E. Teori Pemisahan Kekuasaan	39
F. Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	40
G. Asas –asas Penemuan Hukum	41
H. Teori Hukum Perkawinan	43
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Sifat Penelitian	47
C. Sumber Data Penelitian.....	48
D. Teknik Dalam Pengumpulan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 SEBAGAI SUATU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI.....	51
1. Kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945	51
2. Penafsiran Mahkamah Konstitusi sebagai metode penemuan hukum.....	55

3.	Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan interpretasi futuristis dan tekstual	60
B. KONSEKUENSI YURIDIS PASCA PENEMUAN HUKUM DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PADA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010		
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat (<i>erga omnes</i>) yang memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak terdapat upaya hukum untuk merubahnya	65
2.	Penemuan Hukum dalam Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010	69
3.	Implementasi Pasca Penemuan Hukum dalam Tafsiran Inkonstitusional Bersyarat pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	75
4.	Putusan perkara nomor : 746/Pdt.G/2021/PN. Tng, dan Putusan PT BANTEN Nomor 109/PDT/2022/PT BTN antara Wenny Ariani Kusumawardani selaku PENGGUGAT/PEMBANDING dan Rezky Adhitya Dradjamoko selaku TERGUGAT/TERBANDING merupakan upaya implementasi atas penemuan hukum dalam tafsiran inkonstitusional bersyarat pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	78
BAB V PENUTUP		
A. Kesimpulan		87
B. Saran		89
DAFTAR PUSTAKA.....		
RIWAYAT HIDUP.....		
		91